

SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM PENANGANAN
SAMPAH DI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA
KECAMATAN PADANG BARAT

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

ANDRE AL KINDI PUTRA HENDRAPALA

2210113235

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA
ALAM (PK VIII)**



Pembimbing :

Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum
Amelia Zulfitri, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg : 19/PK-VIII/II/2026

**PERAN PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM PENANGANAN
SAMPAH DI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA
KECAMATAN PADANG BARAT**

*(Andre Al Kindi Putra Hendrapala, 2210113235, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 108 halaman, 2026)*

ABSTRAK

Pengelolaan sampah merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, termasuk dalam penanganan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kecamatan Padang Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Padang dalam penanganan sampah di TPS Kecamatan Padang Barat serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan penelitian lapangan melalui studi kepustakaan, dan wawancara. Tinjauan dalam penelitian ini meliputi aspek kewenangan yang mencakup pengertian dan sumber kewenangan serta kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; aspek penanganan sampah yang mencakup pengertian dan klasifikasi sampah, asas-asas penanganan sampah, serta tahapan penanganan sampah; serta tinjauan mengenai TPS yang mencakup definisi, fungsi, dan permasalahan yang sering terjadi di TPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Padang Barat merupakan kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi sehingga menghasilkan volume sampah yang signifikan. Pemerintah Kota Padang telah melaksanakan perannya melalui pembentukan kebijakan daerah, penyediaan dan pengelolaan TPS, pelaksanaan pengangkutan sampah secara rutin, serta sosialisasi kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana TPS, kekurangan sumber daya manusia petugas kebersihan, keterbatasan anggaran, serta rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kendala-kendala tersebut menyebabkan penanganan sampah di TPS Kecamatan Padang Barat belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas TPS, penguatan pengawasan, serta pembinaan berkelanjutan kepada masyarakat guna mewujudkan pengelolaan sampah yang tertib, efektif, dan berwawasan lingkungan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah; Tempat Penampungan Sementara; Penanganan Sampah.